

ARAB SPRING DI MAROKO: DARI DEMONSTRASI HINGGA TRANSISI REGULASI

ARAB SPRING IN MOROCCO: FROM DEMONSTRATION TO TRANSITION OF REGULATION

Ahmad Zainal Mustofa¹

¹Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adi
Sucipto Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹m.ahmadzainal@gmail.com

Abstrak – Artikel ini menjelaskan tentang fenomena *Arab Spring* yang mengguncang Timur Tengah khususnya di Maroko. *Arab Spring* berhasil menurunkan para pemimpin otoriter dan diktator yang sedang berkuasa. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi. Kemudian penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk memenuhi sumber-sumber penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana strategi Raja Mohammed VI untuk terhindar dari badai revolusi Arab pasca serangkaian aksi protes yang terjadi di negaranya? Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi Raja Mohammed VI dalam menghadapi gelombang demonstran di Maroko bisa dikatakan berbeda dengan cara yang dilakukan negara-negara Afrika Utara lainnya. Raja Mohammed VI mengubah pendekatan penyelesaian masalah bukan dengan jalur kekerasan, tetapi dengan pendekatan persuasif. Upayanya dalam meredam gejolak demonstrasi di negaranya membuahkan hasil. Setidaknya ada dua faktor yang turut mempengaruhi kesuksesannya dalam meredam demonstrasi di negaranya, yaitu faktor keterbukaan dan kepercayaan. Keberhasilannya tersebut membuat Maroko berhasil mempertahankan pemerintahannya tanpa adanya kejatuhan tampuk pimpinan seperti beberapa negara yang dilanda fenomena *Arab Spring*.

Kata Kunci: *Arab Spring*; Maroko, Raja Mohammed VI; Teori Pengambilan Keputusan

Abstract – This article describes the *Arab Spring* phenomenon that rocked the Middle East, especially Morocco. *Arab Spring* succeeded in bringing down the authoritarian leaders and dictators in power. This study uses decision-making theory to describe the problems that occur. Then the writer uses the descriptive-analytical method to fulfill the research sources to be studied. This research tries to answer the question how is the strategy of King Mohammed VI to avoid the storm of the Arab revolution after a series of protests that took place in his country? After conducting the research, we concluded that the strategy of King Mohammed VI in dealing with the wave of demonstrators in Morocco could be said to be different from the method used by other North African countries. King Mohammed VI changed his approach to problem-solving, not using violence but with a persuasive strategy. His efforts in stifling the turmoil of demonstrations in his country bore fruit. At least two factors contributed to his success in reducing protests in his country, namely the factors of openness and trust. This success made Morocco maintain its government without the fall of leadership. It is different from countries in the phenomenon of the *Arab Spring*.

Keywords: *Arab Spring*; Decision Making Theory, King Mohammed VI; Morocco

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade negara-negara besar Arab terkungkung oleh kekuasaan yang otoriter mulai dari Husni Mubarak di Mesir, Abdullah Saleh di Yaman, Ben Ali di Tunisia sampai keluarga Assad di Suriah serta Khadafi di Libya. *Arab Spring* telah mengubah lanskap politik Timur Tengah. Kekuatan kaum muda, bukan partai politik dan kelompok oposisi yang mengubah lanskap politik Timur Tengah. Peran mereka

dalam menggalang solidaritas untuk mengubah rezim otoriter telah mendorong revolusi damai rakyat kecuali di Suriah yang masih berada dalam pusaran konflik militer. Keberhasilan “*Arab Spring*” menggulingkan rezim otoriter disambut euforia. Rakyat bergembira menyaksikan perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Rakyat juga puas dengan diturunkannya penguasa otoriter yang berkuasa puluhan tahun (Setiawan, 2018).

Arab Spring yang terjadi sejak akhir 2010 tersebut menggambarkan efek variabel represi terhadap protes. Tunisia menjadi negara pertama yang terkena badai revolusi di Timur Tengah. Penggulingan cepat diktator Ben Ali secara luas dikaitkan dengan penolakan militer untuk menggunakan kekuatan melawan pengunjuk rasa. Negara selanjutnya yang juga terkena dampak tersebut ialah Mesir. Pemberontakan militer yang terjadi di Mesir juga meruntuhkan rezim. Polisi Mesir telah menggunakan kekerasan untuk meredakan aksi jalanan selama satu dekade. Pada 2011, mereka berusaha memblokir pengunjuk rasa menuju ke Tahrir Square, tetapi karena jumlah pengunjuk rasa begitu banyak, tentara menolak untuk menyerang dan akhirnya Husni Mubarak jatuh. Kasus-kasus ini merujuk pada kegunaan kekuatan koersif untuk menekan rezim pemerintahan dengan ancaman dari jalanan yang dianggap sebagai cara ampuh untuk menggulingkan penguasa dan merebut kekuasaan. Namun kesimpulan yang bisa ditarik dari Suriah dan Maroko justru sebaliknya.

Dalam kasus Suriah, penangkapan dan penyiksaan terhadap anak sekolah yang menulis grafiti memicu protes pada Maret 2011. Pasukan keamanan menindas, menembak, dan membunuh beberapa demonstran tak bersenjata sehingga menimbulkan siklus resistensi dan represi yang meningkat. Di Maroko, raja dipuji untuk menghindari represi parah. Ia menepis protes dengan menawarkan konsesi yang cepat dan cermat, ditambah dengan penindasan yang ringan dan selektif. Suriah dan Maroko menyarankan penggunaan kekerasan terhadap warga negara yang tidak bersenjata mungkin kontra produktif untuk stabilitas rezim (Lawrence, 2016).

Maroko juga memiliki cerita yang sama dengan Tunisia, setidaknya ada dua nama yang meninggal akibat rezim pemerintah, yaitu Mohcine Fikri dan Mbarek al-Karassi dimana nama terakhir meniru aksi Bouazizi dengan membakar dirinya (Verlin, 2015.). Aktivis gerakan 20 Februari 2011 yang terjadi di Maroko menjadi langkah awal masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Aktivitas itu menekankan perjuangan mereka masyarakat untuk melawan birokrasi dan kelompok otoritas yang kuat di sekitar Raja Mohammed VI, yang disebut makhzen. Kaum muda gerakan 20 Februari melanjutkan perjuangan mereka melalui berbagai platform digital, halaman Facebook dan akun Twitter, untuk menginformasikan semua orang tentang tuntutan mereka dan tindakan yang akan mereka atur (Brouwer & Bartels, 2014).

Peneliti tertarik untuk meneliti *Arab Spring* di Maroko karena Maroko dianggap merepresentasikan negara yang berhasil dalam menghadapi gelombang protes dari masyarakatnya. Penelitian ini akan berfokus

terhadap strategi Raja Mohammed VI dalam meredakan aksi protes masyarakat sipil dalam proses perubahan rezim otoriter menjadi demokratis di Maroko. Selain itu, Maroko merupakan negara yang selamat dari gelombang *Arab Spring*, hal ini dibuktikan dengan tidak lengsernya Raja Mohammed VI dari kursi kepemimpinannya. Kemudian bagaimana strategi Raja Mohammed VI untuk terhindar dari badai revolusi Arab pasca serangkaian aksi protes yang terjadi di negaranya? Tulisan ini akan mencoba menjawabnya dengan terlebih dahulu mengupas sekilas tentang *Arab Spring* dan kemunculan gerakan demonstrasi di Maroko serta kondisi ekonomi dan faktor yang mengubah regulasi kerajaan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, mengacu pada pergeseran fokus utama hubungan internasional, cara analisis, pemilihan waktu dan tempat yang spesifik menjadi umum dalam format teoritis. Area penekanan baru ini bisa menjadi sangat penting dalam perumusan teori prediksi politik hubungan internasional, tetapi lebih signifikan untuk membuat rancangan pengorganisasian atau pendekatan yang bisa dioperasionalkan dalam berbagai peristiwa dan fakta politik internasional lainnya. Hal ini menghasilkan tren baru dalam disiplin ilmu yang memaksa para sarjana dan simpatisan tidak hanya untuk belajar dari perspektif historis dan deskriptif dan dasar internasional. Namun, hal tersebut juga menjadi perhatian dengan memilih data relevan dengan masalah tertentu, pemesanan dan terkait data yang dikumpulkan satu sama lain dengan maksud untuk sampai pada generalisasi awal yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori. Salah satu teori dalam politik internasional adalah teori pengambilan keputusan (Afinotan, 2014).

Pandangan politik melihat pengambilan keputusan sebagai proses tawar-menawar yang dipersonalisasi dan didorong oleh agenda peserta daripada proses rasional. Seringkali seseorang berbeda dalam tujuan organisasi, nilai, dan relevansi informasi. Proses pengambilan keputusan tidak pernah berakhir, tetapi tetap merupakan pertempuran berkelanjutan antara koalisi yang berbeda. Setelah satu grup memenangkan satu putaran pertempuran, pihak lain mungkin berkumpul kembali atau menjadi lebih bertekad untuk memenangkan kesempatan berikutnya. Pengaruh dan kekuasaan digunakan dengan cara yang disengaja dan untuk memajukan kepentingan pribadi. Tujuan koalisi ditentukan oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh apa yang baik untuk negara organisasi secara keseluruhan (Turpin & Marais, 2004). Menurut Herbert Simon, terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, antara lain: Intelijen untuk mengumpulkan informasi, desain untuk memilih

kriteria tindakan, pilihan untuk membuat keputusan, implementasi untuk memberlakukan keputusan (Mintz & DeRouen, 2010).

Keempat faktor tersebut merupakan unsur penting dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin negara perlu mengetahui informasi yang akurat dari intelijen negara untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hasil identifikasi tersebut kemudian dibuatkan desain alternatif untuk mengatur strategi-strategi yang akan digunakan. Strategi yang dirasa paling memungkinkan akan dipilih untuk diimplementasikan sebagai bentuk kebijakan. Seperti halnya sikap pemerintah Maroko dalam menghadapi gelombang demonstrasi pasca *Arab Spring*. Pemimpin negara tentu harus mampu mengkondisikan stabilitas negaranya agar konstelasi politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya bisa tetap berjalan dengan baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan mencari dan menyusun data yang relevan dengan pembahasan terlebih dahulu, setelah itu kemudian dilakukan proses analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai data yang bersumber dari dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun laporan penelitian. Setelah semua dokumen terkumpul, dilakukan filterisasi yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian (Moehnilabib, 1997).

Kajian kepustakaan diawali dengan membaca karya-karya yang terkait dengan tema yang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan adalah buku, artikel dan berita yang terkait dengan pembahasan *Arab Spring* khususnya di Maroko. Peneliti mencoba membaca sebuah gerakan sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap regulasi politik di Maroko. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi pembacanya khususnya dalam kasus *Arab Spring* di Maroko, sehingga tulisan ini dapat bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Arab Spring

Istilah *Arab Spring* di Timur Tengah dikenal luas sebagai sebuah aksi protes massa yang bertujuan untuk menggulingkan, menurunkan, melengserkan serta mengukudeta para pemimpin negara karena telah bertindak diktator, otoriter dan korup, dan menindas rakyat dalam memimpin. Dalam revolusi di negara-negara Timur Tengah tersebut, pemuda menjadi motor pergerakan masyarakat untuk menuntut keadilan dan

meninggalkan rezim yang merugikan rakyat (Agastya, 2013).

Arab Spring merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai *Arab Spring* dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab ditulis *ats-tsaurat al-arabiyyah* yang bermakna gelombang gerakan perlawanan rakyat pro demokrasi yang menuntut perubahan politik di kawasan Timur Tengah. Menurut Machmudi, gerakan yang awalnya dilihat sebagai gerakan demokrasi ini pada akhirnya tidak melahirkan rezim baru yang demokratis. Sebagian besar rezim-rezim baru yang terbentuk setelah revolusi Arab ini cenderung kembali ke sifat asalnya yaitu rezim otoritarian. Fenomena ini terjadi di Mesir, Libya, Yaman maupun Sudan. Suriah masih terus bergejolak terjadi perang saudara yang melibatkan pasukan rezim penguasa dengan kelompok oposisi. Demikian pula di Yaman, perubahan rezim justru melahirkan pemberontakan kelompok Houthi sehingga menjadikan Yaman terpuruk dalam perang saudara yang berkepanjangan. Negara-negara lain relatif lebih baik dalam mengakomodasi tuntutan perubahan politik dengan melakukan reformasi politik yang memperkuat proses demokratisasi. Fenomena ini terjadi di Tunisia, Maroko, Oman dan Qatar (Machmudi, 2020).

Pendorong peristiwa "*Arab Spring*" yang utama adalah mobilisasi massa oleh teknologi dan pemuda, kemudian peran yang dimainkan oleh pasukan keamanan militer rezim serta intervensi oleh pasukan luar. Selama bertahun-tahun, negara-negara yang mengalami gelombang *Arab Spring* telah menggagalkan pengembangan kepemimpinan alternatif di luar rezim yang memerintah. Selain itu, lamanya kekuasaan rezim di semua negara yang terkena "*Arab Spring*" berdampak pada kondisi dalam negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat dan perilaku koruptif para pejabat negara. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang memicu gelombang protes secara masif. Mereka menuntut turunnya rezim penguasa yang digantikan oleh penguasa baru dengan politik alternatif yang pro terhadap masyarakat (Mustofa, 2020).

Peristiwa ini berawal ketika seorang pemuda Tunisia bernama Muhammad Bouazizi membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah di negaranya. Upayanya dalam memperjuangkan keadilan tidak sia-sia, tidak lama setelah itu gelombang aksi protes masyarakat berdatangan sebagai bentuk solidaritas terhadap Bouazizi sekaligus menuntut presiden Ben Ali untuk dicopot (Verlin, n.d.). Faktor-faktor yang menjadi latar belakang *Arab Spring*, yakni (Prabowo, 2020.):

1. Rezim otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun di negara-negara Timur Tengah.

2. Tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah.
3. Keinginan masyarakat Arab untuk memperbaiki sistem sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan.
4. Kemunduran dalam hal hak-hak politik dan kebebasan sipil di beberapa negara Timur Tengah.

Sebagaimana pemaparan di atas, keempat faktor pemicu *Arab Spring* memang merupakan sebuah realitas yang terjadi di kebanyakan negara-negara Timur Tengah. Lamanya kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara menciptakan sistem otoritarianisme yang akhirnya membuat mereka bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Kesewenangan tersebut menciptakan banyak celah bagi kejahatan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat merasa jenuh dan menginginkan pembaruan di bidang politik, ekonomi dan sosial agar dapat hidup dengan lebih baik karena selama ini hak-hak politik dan kebebasan sipil bagi masyarakat di beberapa negara Timur Tengah sangat dibatasi. Keempat faktor tersebut yang kemudian mendorong masyarakat untuk berontak dan menyuarakan protes untuk perubahan politik dan demokrasi.

Tabel 1. menyuguhkan kondisi awal 11 negara di Timur Tengah yang mengalami guncangan *Arab Spring*. Perubahan demokrasi yang terjadi di negara-negara tersebut diakibatkan oleh adanya gelombang protes baik skala kecil maupun besar.

Semua faktor tersebut merupakan bagian dari fenomena *Arab Spring* yang meminta adanya perubahan sistem politik dan pemerintahan menuju demokratisasi. Selain faktor yang berkaitan langsung antara protes warga negara dan pemerintahannya, ada pula faktor perseteruan abadi dari perang saudara dalam satu negara.

Kemunculan Demonstrasi di Maroko Pasca *Arab Spring*

Ketika Raja Hassan meninggal pada bulan Juli tahun 1999, Muhammad VI yang merupakan putranya melanjutkan tongkat estafet pemerintahan dan segera menghadapi pusaran politik.

Kontroversi berkecamuk di Maroko atas proposal pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas bagi kaum perempuan dan untuk memberikan mereka lebih banyak kesetaraan dalam masyarakat, seperti hak yang lebih besar dalam pernikahan, warisan, dan perceraian.

Hal tersebut termasuk juga di dalamnya berupa akses yang lebih besar ke pendidikan serta representasi yang lebih menyeluruh dalam pemerintah dan layanan sipil. Program liberal jenis ini dalam pandangan masyarakat konservatif dan religius Maroko memicu perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok Islam, dan sejumlah organisasi mulai dari kelompok fundamentalis Muslim hingga anggota organisasi hak asasi manusia internasional berkumpul dalam demonstrasi besar di Casablanca dan Rabat untuk mendukung atau menentang program pemerintah. Ketika serangkaian demonstrasi dan pemberontakan populer melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal tahun 2011, pada tanggal 20 Februari 2011 para demonstran pro-demokrasi Maroko melakukan unjuk rasa di kota-kota besar negara itu untuk menyerukan reformasi ekonomi dan politik (Barbour, *The Reign of Muhammad VI.*).

Demonstrasi pertama pada 20 Februari 2011 menjadi sukses besar, orang-orang dari seluruh negara turun ke jalan untuk bersuara. Sebanyak lima puluh tiga kota terpengaruh dengan kedatangan sekitar 150.000 hingga 200.000 pengunjung rasa. Momen langka di Maroko ini sekaligus menjadi sejarah. Hal ini menjadi gerakan baru yang dipengaruhi oleh media. Setidaknya

Tabel 1. Protes dan Perubahan Politik di 11 Negara Arab

		Kecil atau tidak ada protes	Protes besar
Tidak ada demokratisasi awal	• Tidak ada liberalisasi politik	1. Aljazair 2. Palestina 3. Sudan	
	• Keruntuhan negara dan perang saudara		
Demokratisasi awal	• Liberalisasi politik	1. Yordania	1. Bahrain 2. Maroko
	• Runtuhnya demokratisasi		1. Mesir
	• Demokratisasi berkelanjutan		1. Tunisia

Sumber: Spierings, 2019

ada beberapa faktor pemersatu tujuan gerakan sosial baru ini, yaitu karakter desentralisasi dengan kelompok otonom di setiap kota, masing-masing menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi penting dalam pergerakan. Misalnya, Casablanca, Tangier dan Tetouan, masing-masing memiliki kelompok aktivisnya sendiri, yang memobilisasi orang dari jaringan mereka dan menggunakan halaman Facebook khusus mereka, berkomunikasi dengan kelompok orang lokal lainnya. Ciri lain dari gerakan baru ini adalah kurangnya pemimpin formal yang terpusat. Dalam konteks politik, tanpa kebebasan pers atau berbicara, media sosial, yang memungkinkan adanya pesan menyebar dengan sangat cepat, semakin signifikan (Brouwer & Bartels, 2014).

Maroko menghindari banyak kekerasan yang terjadi dalam merespon *Arab Spring* karena *Justice and Development Party* (JPD) atau Partai Keadilan dan Pembangunan Islam telah menjadi partai oposisi yang diakui pada tahun-tahun sebelum naik ke tampuk kekuasaan pada pemilihan November 2011. Hal ini sangat kontras dengan partai-partai Islam yang berkuasa selama protes *Arab Spring* di Mesir, Tunisia dan Libya. Di Mesir, Hosni Mubarak mengumumkan bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi terlarang. Di Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali menyerukan bahwa gerakan *Ennahda* dilarang dan para pemimpinnya diusir ke pengasingan. Di Libya, *Ikhwanul Muslimin* juga mengalami nasib yang tidak lebih baik di bawah pemerintahan Mu'ammarr Qadhafi. Di Maroko, bagaimanapun pemerintahan lama tetap berkuasa, dan kaum Islamis juga berhasil. JPD di Maroko, meskipun selalu diakui sebagai partai oposisi, tidak memainkan peran dalam pemerintahan Maroko sebelumnya, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka sangat sukses dalam pemilihan umum. Para pemilih tidak memandang JPD sebagai partai "korup" atau "kolaborator" dengan rezim. Faktor lain yang mungkin menguntungkan JPD terkait dengan cara mereka menanggapi tuntutan para pemrotes pada tahun 2011. Partai JPD melakukan pendekatan yang terukur dengan cara mendorong raja untuk melakukan reformasi. Sikap tersebut tentu tidak menyebabkan ketidakstabilan atau mengundang tanggapan keras dari rezim. Fenomena sebaliknya justru terjadi di Tunisia dan Mesir, pengunjung rasa menuntut perubahan rezim total. Tidak jauh berbeda dengan Libya,untutannya sama seperti Mesir dan Tunisia hingga akhirnya protes berkembang menjadi perang penuh. Namun di Maroko, JPD menunjukkan kesediaan untuk bertemu raja dengan menerima konsesinya meskipun beberapa pemrotes menuntut perubahan rezim secara total. Tidak jelas seberapa besar kekuasaan yang pada awalnya ingin diberikan oleh raja, tetapi raja dan penasihatnya

mungkin telah menyadari bahwa reformasi mereka harus dilakukan secara mendalam jika mereka ingin menghindari perkembangan di negara tetangga Mesir dan Tunisia, di mana kedua pemerintah tersebut benar-benar digulingkan (Tawil, 2013).

Kondisi Perekonomian di Maroko

Kondisi ekonomi Maroko berubah setelah peristiwa *Arab Spring*. Pemimpin kerajaan mendiversifikasi dan memperkuat kemitraan ekonominya dengan mencari keluar aliansi baru dan memperkuat aliansi lama. *Arab Spring* bukanlah pemicu utama masalah politik, namun peristiwa ini juga dipicu oleh masalah sosial ekonomi. *Arab Spring* di Maroko tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan pemerintahan semata, namun juga kondisi ekonomi yang mengalami pasang surut. Memang, sementara ini Maroko relatif kebal terhadap krisis ekonomi global tahun 2008 karena pelaksanaan reformasi strategis, situasi ekonomi memburuk secara bertahap sejak saat itu. Sementara kerajaan berkinerja baik di tingkat ekonomi dari 2004 hingga 2011 dengan pertumbuhan rata-rata 4,9% -hampir dua kali lipat dari tingkat rata-rata selama 1990an- situasi mulai memburuk pada tahun 2010 (Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018).

Defisit anggaran negara meningkat dari 4,7% pada tahun 2010 menjadi 6,1% pada tahun 2011. Selanjutnya karena efek gabungan dari penurunan permintaan asing dan kenaikan harga komoditas, defisit eksternal negara meningkat dari 4,5% dari PDB pada tahun 2010 menjadi 6,5% pada tahun 2016. Sementara inflasi dipertahankan di kerajaan sebesar 1% pada tahun 2009 dan 0,9% pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012 prospek ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian *Arab Spring* dan konteks politik pasca-*Arab Spring*, serta krisis utang Zona Euro-Eropa menjadi mitra dagang utama Maroko. Memang, salah satu risiko terbesar bagi perekonomian Maroko adalah ketergantungannya di Eropa, kawasan yang mengimpor sebagian besar barangnya (66% pada tahun 2010). Faktanya, saat resesi melanda Eropa, ekonomi Maroko juga terpengaruh. Pertama dalam hal ekspor (ekspor fosfat, misalnya, turun 10%), lalu dalam hal pendapatan wisatawan (yang menurun 5,7%). Pasar saham menderita, dan volume transfer uang dari Maroko ke kerajaan menurun sebesar 5,8% (Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018).

Keterlibatan tentara yang kuat dalam ekonomi membuatnya menjadi sebuah pihak yang berkepentingan daripada penengah yang tidak memihak antara pesaing pemangku kepentingan. Karenanya, tentara tidak dapat membangun legitimasi diperlukan untuk berfungsi dengan otonomi. Kerajaan Maroko terus didominasi oleh raja dan rombongannya. Artinya, model perkembangan

adalah hasil dari jalan ketergantungan dengan hubungan kuat ke masa lalu. Kepentingan ekonomi raja masih sewa sebagai monopoli. Namun dengan peningkatan konten publik, raja beroperasi dengan beberapa elemen otonomi terutama dalam promosinya dalam penanaman modal asing di Maroko. Melalui strategi perantara keuangan baru -didorong oleh monarki dan mekhzen-raja berfokus untuk menangkap pasar luar negeri di sub-Sahara Afrika (SSA) melalui penggalangan dana internasional dari Teluk, Rusia dan Cina. Ekspansi di SSA dipimpin oleh kerajaan yang memegang *Al Mada* atau *Societe Nationale d'Investissement* (SNI) yang artinya perusahaan induk Maroko milik konglomerat dan investasi publik dan swasta lainnya yang terkait erat dengan monarki. Pada hal ini khususnya *Attijari-wafa Bank*, bank terkemuka di Maroko dan badan keuangan *Al Mada* dan *Bank of Africa* (BMCE). Raja memiliki hubungan dekat dengan Presiden BMCE Othmane Benjelloune yang merupakan anggota keluarga kerajaan Mohammed VI. Selain kepemilikan di sejumlah sektor seperti keuangan dan konstruksi, raja memegang saham *Al Mada* dalam ritel di mana ia memiliki kepemilikan saham di dua perusahaan otomotif yaitu *Sopriam* (distributor Peugeot, Citroen, dan DP) dan *Renault Maroc* (El-Haddad, 2020).

Hal ini dikarenakan Maroko memiliki ketergantungan dengan negara luar seperti Eropa, khususnya Rusia dan Cina. Di tengah situasi yang tidak stabil, Raja Mohamed VI memainkan strategi dengan mempromosikan Maroko guna mendapatkan investor asing untuk penanaman modal. Maroko juga mengandeng *Al Mada* dan BMCE untuk menjaga stabilitas perekonomiannya.

Strategi dan Transisi Regulasi Pemerintah Maroko

1. Faktor Keterbukaan dan Kepercayaan

Pada tanggal 9 Maret 2011, tak lama setelah protes *Arab Spring* menyebar ke Maroko, Raja Mohammed VI mengumumkan proses revisi konstitusi dan menunjuk dewan untuk menyusun konstitusi yang direformasi. Tiga bulan setelah pidato penting ini, Raja menyetujui konstitusi baru. Satu dari kontribusi paling signifikan yang menjadi dorongan reformis terakhir ini adalah memperluas kekuasaan Perdana Menteri Maroko. Konsolidasi kepentingan berikutnya antara Istana dan pemerintah yang baru terpilih mendorong negara untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Islamis -Abdelilah Benkirane dari Partai Keadilan dan Pembangunan (JPD)- mendorong para sarjana untuk mempelajari pergeseran keseimbangan kekuasaan antara rezim dan pemerintah (Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018).

Tanggapan proaktif Raja Mohammed VI terhadap

tuntutan pengunjuk rasa telah mencegah kekerasan publik. Pada awal 2011, terinspirasi oleh peristiwa di Tunisia dan Mesir, pemuda Maroko memulai gerakan 20 Februari untuk membahas kekuasaan monarki, transparansi, dan korupsi. Maati Monjib seorang profesor di Universitas Rabat mengatakan bahwa gerakan 20 Februari yang melibatkan lebih dari 200.000 orang Maroko mewakili “pertama kalinya di Maroko, Raja dikritik secara terbuka dan mereka tidak menembak orang” (Verlin, 2015).

Raja Mohammed VI memilih untuk secara terbuka menyampaikan kekhawatiran para demonstran dan mengumumkan rencana revisi konstitusi dalam waktu satu bulan. Tanggapan Raja memadamkan perbedaan pendapat dan dengan cepat mengalihkan protes menjadi tindakan politik. Referendum konstitusi tahun 2011 terbukti berhasil, karena 70% penduduk memilih dan 98% dari mereka memberikan suara mendukung. Daya tarik utama dari konstitusi ini yang membedakannya dari konstitusi 1996 adalah sub-bagian yang berfokus pada hak asasi manusia. Hak-hak vital bagi rakyat Maroko disebutkan dalam Pasal 20 hingga Pasal 31 termasuk hak untuk hidup, hak atas integritas fisik dan moral, hak atas peradilan yang adil, kebebasan pers, dan kesetaraan gender. Selain itu, dimasukkannya hak untuk masyarakat adat Amazigh, seperti menjadikan Tamazight sebagai bahasa nasional, merupakan langkah maju yang besar. Namun, kecuali untuk memutuskan hubungan peran Raja, reformasi politik dan ekonomi dalam konstitusi sebagian besar tidak diperhatikan oleh masyarakat umum. Reformasi politik dalam konstitusi baru sebagian besar berfokus pada pembagian kekuasaan antara Raja dan parlemen. Konstitusi 2011 agak memperkuat kekuasaan parlementer, tetapi Raja tetap memegang sebagian besar kewenangan politik (Verlin, 2015).

Raja Mohammed VI mengedepankan proses reformasi konstitusi yang menghasilkan amandemen konstitusi 2011 setelah protes *Arab Spring* sempat melanda Maroko. Oleh karena itu, Konstitusi ini dapat dilihat sebagai inti dari serangkaian reformasi top-down yang bertujuan untuk mengatasi protes dan tuntutan gerakan 20 Februari, koalisi oposisi utama yang terorganisir selama demonstrasi *Arab Spring* di Maroko (Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018).

Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Raja Mohammed VI memang berbeda dari cara pendekatan negara-negara Afrika Utara yang juga terkena *Arab Spring*. Aspek humanisme yang dikedepankan oleh Raja Mohammed VI terbukti lebih tepat daripada menggunakan militer. Ia sangat mencegah adanya korban jiwa akibat bentrokan masyarakat dan pemerintah.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam UUD 2011 adalah pasal 47 yang memperluas kekuasaan dan fungsi kepala pemerintahan dan spesifik menyatakan bahwa nama terakhir harus disebutkan di antara jajaran partai dengan suara terbanyak dan bukan atas keinginan raja. Pada tingkat langsung, Pasal 49 membatasi raja dalam melakukan kebijakan luar negeri. Di tingkat lain, pasal 47 berdampak pada kekuasaan kebijakan luar negeri raja karena mengambil keputusan menunjuk perdana menteri di luar kendali penuhnya. Kemudian perdana menteri harus ditunjuk dari partai pemenang dan bukan atas kemauan raja. Kedua, Pasal 92 menetapkan bahwa dewan pemerintah (diketuai oleh kepala pemerintahan) memiliki kapasitas untuk musyawarah, antara lain tentang berbagai isu, perjanjian internasional sebelumnya diserahkan ke dewan pemerintahan. Dengan demikian kepala pemerintahan dapat mengusulkan perwakilan tinggi dan juga dapat membicarakan tentang perjanjian internasional. Sebagaimana dikemukakan dalam tabel 2 (Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018).

Seperti reformasi pada umumnya, Raja Mohammed VI mengubah tradisi dahulu mengenai pembatasan dan pengendalian terhadap masyarakat. Ia seperti membuka keran air yang sudah lama terbenyung. Kebijakannya dalam memberi kebebasan dan keadilan terhadap masyarakatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang begitu diinginkan oleh rakyatnya. Dia menyadari bahwa untuk menyelamatkan Maroko dari gelombang *Arab Spring*, ia harus membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat, namun juga menguntungkan bagi pemerintah.

Sebuah keputusan berani yang diambil oleh Raja Mohammed VI untuk membuat perubahan di negaranya. Tentu dampak yang ia terima begitu sepadan dengan keputusannya. Ia memperoleh dukungan dari

orang-orang yang menjadi tahanan politik semasa ayahnya, sehingga mereka mendukung kebijakan yang dibuatnya. Ia memperkuat kepercayaan masyarakat terhadapnya dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih bisa dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya tetap terjaga.

2. Dampak dari Strategi Pemerintah Maroko

Perubahan arah kebijakan yang dilakukan Raja Mohammed VI dari kekuasaan absolut menuju demokrasi sangatlah tepat, karena demokrasi merupakan sebuah system yang didambakan oleh setiap insan. Inti dari demokrasi yang stabil akan terus mempunyai pengaruh yang besar di dunia. Dengan adanya perubahan konstitusi yg lebih mengedepankan demokrasi, strategi Raja Mohammed VI bisa diterima oleh rakyat, karena pro terhadap rakyat.

Raja Mohammed VI pada awal 2011 menanggapi penyebaran protes pro-demokrasi di wilayah Afrika Utara dengan melaksanakan program reformasi yang mencakup konstitusi baru dan disahkan, di mana beberapa kekuatan baru diperluas ke parlemen dan perdana menteri, tetapi otoritas tertinggi tetap di tangan Raja. Pada November 2011, Partai Keadilan dan Pembangunan (JPD) memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan parlemen, menjadi partai Islam pertama yang memimpin Pemerintah Maroko. Pada September 2015, Maroko mengadakan pemilihan langsung pertamanya untuk dewan daerah, salah satu reformasi yang termasuk dalam konstitusi 2011. PJD kembali memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan parlemen nasional pada Oktober 2016 (cia.gov. 2021.).

Draft referendum yang diajukan oleh Raja Mohammed VI mendapat sambutan positif dari

Tabel 2. Fungsi Dewan Menteri dan Dewan Pemerintah

Konstitusional Institusi	Dewan Menteri (diketuai oleh raja)	Dewan Pemerintah (diketuai oleh Kepala Pemerintahan)
Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi strategis kebijakan negara. 2. Rancangan undang-undang organik. 3. Pedoman umum hukum keuangan. 4. Deklarasi perang. 5. Penunjukan lembaga publik dan negara, pejabat tinggi perusahaan setelah proposal dari PM dan menteri terkait 	<p>Kebijakan publik dan sektoral Gerakan kepercayaan.</p> <p>Pertanyaan yang berhubungan dengan manusia masalah hak dan ketertiban umum.</p> <p>UU Legislasi Proyek, dekrit-hukum.</p>
Tipe	Keputusan strategis	Manajemen masalah kebijakan

Sumber: Abouzzohour & Tome-Alonso, 2018

masyarakatnya. Ribuan orang mendatangi gedung parlemen di Jalan Muhammad V secara bergelombang dan berkelompok. Tepat pada hari referendum, kaum laki-laki, kaum perempuan dan ibu rumah tangga juga ikut ambil bagian dalam demonstrasi besar itu. Demonstrasi ini didominasi oleh kelompok pemuda. Tidak ada aksi anarkis atau gelombang kemarahan warga, menjelang magrib mereka membubarkan diri sambil meneriakkan Raja Muhammed VI sebagai satu-satunya raja mereka (Santosa, 2012.).

Demonstrasi yang dilakukan oleh warganya ini bukanlah demonstrasi menuntut kemunduran ataupun mengarah kepada hal yang anarkis. Namun demonstrasi ini adalah bentuk dukungan dari warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Mohammed VI. Mereka memberikan dukungan moral dengan berpartisipasi pada acara referendum demokrasi tersebut. Dengan demikian, reformasi konstitusi ini memberikan dampak yang positif terhadap konstelasi politik dalam negeri. Maroko berhasil terhindar dari fenomena *Arab Spring* meskipun dengan konsekuensi mengubah regulasi menjadi lebih demokratis.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Maroko dikarenakan kebijakan kontroversi Maroko untuk memberikan akses yang lebih luas bagi kaum perempuan dan untuk memberikan mereka lebih banyak kesetaraan dalam masyarakat, seperti hak yang lebih besar dalam pernikahan, warisan, dan perceraian. Dalam pandangan masyarakat konservatif dan religius Maroko kebijakan ini dianggap liberal dan memicu perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok Islam, dan sejumlah organisasi mulai dari kelompok fundamentalis Muslim hingga anggota organisasi hak asasi manusia internasional berkumpul dalam demonstrasi besar di Casablanca dan Rabat untuk mendukung atau menentang program pemerintah. Gerakan demonstrasi tersebut dikenal dengan gerakan 20 Februari. Strategi Raja Mohammed VI dalam menghadapi demonstrasi ketika Maroko terkena *Arab Spring* berhasil menghentikan demonstrasi ke arah yang lebih besar. Setidaknya ada dua hal yang menjadi faktor kunci atas keberhasilannya meredakan gejolak massa, yaitu: faktor keterbukaan dan faktor kepercayaan. Kebijakannya dalam mereformasi konstitusi menghasilkan tanggapan positif dari berbagai pihak, adapun isi konstitusi baru Maroko adalah kebebasan berbicara dan berserikat, amazigh menjadi salah satu bahasa resmi Maroko, raja tidak lagi absolut, tetapi constitutional, menekankan kebijakan pada hak asasi manusia. Dari keempat poin tersebut, sikap terbuka Raja Mohammed VI dalam mendengarkan

aspirasi sesuai kebutuhan rakyat tidak hanya wacana, tetapi juga direalisasikan demi ketentraman rakyatnya. Kemudian dampak dari keberhasilan strategi tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat, pada hari referendum konstitusi masyarakat dari berbagai kalangan datang untuk mendukung pemerintah hingga akhirnya terjadinya pengesahan terhadap konstitusi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abouzzohour, Yasmina dan Beatriz Tomé-Alonso. (2018). Moroccan foreign policy after the *Arab Spring*: a turn for the Islamists or persistence of royal leadership?. *The Journal of North African Studies*, 1-21.
- Afinotan, L. Andy. (2014). Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, 10 (5), 249-256.
- Agastya, M. (2013). *Arab Spring*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Barbour, Nevill. dkk. *The reign of Muhammad VI*. Retrieved from <https://www.britannica.com/place/Morocco/The-reign-of-Muhammad-VI>
- Brouwer, Lenie dan Edien Bartels. (2014) *Arab Spring in Morocco: social media and the 20 February movement*. *Afrika Focus*, 27 (2), 9-22.
- Cia.gov. *Morocco*. (2021). Retrieved from <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/>
- El-Haddad, Amirah. (2020). Redefining the social contract in the wake of the *Arab Spring*: The experiences of Egypt, Morocco and Tunisia. *World Development*, 127 104774. 1-22.
- Lawrence, Adria K. (2016). *Repression and Activism among the Arab Spring's First Movers: Evidence from Morocco's February 20th Movement*. Cambridge University Press.
- Machmudi, Yon. (2010). *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mintz, Alex dan Karl DeRouen. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- Moehnilabib, & dkk. (1997). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Mustofa, Ahmad Zainal. (2020). *Perang Proksi Amerika Serikat dan Iran dalam Politik Global Pasca Arab Spring*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Prabowo, Gama. (2020). *Politik Arab Spring di Timur Tengah*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/165128669/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>
- Santosa, Teguh. (2012). *Inilah Kronik Sepak Terjang Maroko dan Raja Muhammad VI dalam Setahun*

- Terakhir*. Retrieved from <https://dunia.rmol.id/read/2012/07/23/71958/inilah-kronik-sepak-terjang-maroko-dan-raja-muhammad-vi-dalam-setahun-terakhir>
- Setiawan, Asep. (2018). *Dinamika Timur Tengah*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Spierings, Niels. (2019). Democratic disillusionment? Desire for democracy after the Arab uprisings. *International Political Science Review*. 1-16.
- Tawil, Camille. (2013). Morocco's Stability in the Wake of the *Arab Spring*. *CTC Sentinel*. 6(5). 18-20.
- Turpin, SM dan MA Marais. (2004). *Decision-making: Theory and practice*. <http://www.orssa.org.za>. 20 (2), 143–160.
- Verlin, Percia. (2015). *Morocco and the Arab Spring*. Retrieved from <http://www.sirjournal.org/blogs/2015/2/26/morocco-and-the-arab-spring>